

**TELAAH KRITIS TERHADAP SIKAP POLITIK KENEGARAAN  
M. NATSIR DAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PANCASILA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun Oleh :**

**NANANG FIRMANSYAH**

**NIM. 10360009**

**PEMBIMBING:**

- 1. AHMAD ANFASUL MAROM, S.H.I.,M.A.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA**

**YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAKS

Pancasila adalah landasan moral, haluan kebangsaan, dan ideologi resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan dan digali dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Namun, dalam perjalanannya Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi sebagian muslim yang mencita-citakan negara Islam bisa dianggap sebagai penghalang Islam, sekular, dan mengkhianati kaum muslimin. Hal ini dikarenakan negara tidak secara tegas mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Dari sinilah muncul dua tokoh yang akan dikaji yakni, M. Natsir dan Abdurrahman Wahid. Dari kedua tokoh ini, akan dikaji dari faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik keduanya terhadap Pancasila serta persamaan dan perbedaan keduanya dalam memandang Pancasila sebagai ideologi negara.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur. Sementara Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *filosofis-historis*, yaitu suatu pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku sebagai upaya penegasan yang juga merupakan pengaruh dari hasil interaksi dengan lingkungan dan akar sejarah yang berkembang. Penelitiannya bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikirannya secara sistematis, terkait suatu permasalahan dari dua tokoh yang memiliki latar belakang dan sikap yang berbeda.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, ditinjau faktor-faktor yang mempengaruhi sikap M. Natsir dan Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari pengaruh sosial, pendidikan, organisasi, karier politik dan dasar pemikiran. Sehingga, dapat jelas dilihat pada sisi persamaannya kedua tokoh tersebut sama-sama menerima bahwa di dalam Islam tidak mengatur pembentukan sebuah negara dan menerima bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga menerima demokrasi. Akan tetapi, dari segi perbedaan M. Natsir dengan tegas menolak Pancasila sebagai ideologi negara karena tidak sesuai dengan Islam, sedangkan Abdurrahman Wahid dengan terbuka menerima Pancasila karena menurutnya itu merupakan pemersatu bangsa dan merupakan buah pikiran dari budaya Indonesia itu sendiri.

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Nanang Firmansyah

NIM: 10360009

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Jurusan: Perbandingan Madzhab

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata dikemudian hari terbukti plagiasi maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2014

Yang menyatakan,



Nanang Firmansyah  
NIM. 10360009



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Nanang Firmansyah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Firmansyah

NIM : 10360009

Judul : **“Telaah Kritis Terhadap Sikap Politik Kenegaraan M. Natsir dan  
Abdurrahman Wahid Tentang Pancasila”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1435 H  
8 Oktober 2014 M

Pembimbing I

Ahmad Anfasul Marom, SHI., M.A.  
NIP.19811107 200912 1 002

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

UIN.02/k.PM.SKR/ /14

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **"Telaah Kritis Terhadap Sikap Politik  
Kenegaraan M. Natsir dan  
Abdurrahman Wahid Tentang  
Pancasila"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nanang Firmansyah

NIM : 10360009

Telah dimunaqasyahkan pada: 23 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan  
Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah  
Ketua,

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.  
NIP. 19811107 200912 1 002

Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 30 Oktober 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan,



Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

# Halaman Persembahan

*Kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- ❖ *Bapak-Ibu, serta keluarga besar yang selalu mendukung dalam setiap langkah perjalanan hidupku.*
- ❖ *Istriku terkasih dan tersayang yang tiada henti memberikan motivasi dan semangat atas perjuangan dalam menuntut ilmu.*
- ❖ *Segenap Guru dan sahabat-sahabatku.*

## Motto

ذَلَّتْ طَالِبًا فَعَزَّتْ مَطْلُوبًا

Engkau memang harus bersusah payah mencari ilmu, namun suatu saat engkau akan mulia dan dicari orang karena peroleh ilmu. (Ibnu Abbas).

*Siap Sedia Setia Hadir dan Mengalir*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāil	Ẓ	zet (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Sad	Š	es (titik di bawah)
ط	Dad	Ḍ	de (titik di bawah)
ظ	ta'	Ṭ	te (titik di bawah)
ع	Za	Ẓ	zet (titik di bawah)
غ	'ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
ف	Gain	G	Ge
ق	fa'	F	Ef
ك	Qaf	Q	Qi
ل	Kaf	K	Ka
م	Lam	L	'el
ن	Mim	M	'em
و	Nun	N	'en
هـ	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye



## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

نَزَلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

## C. Vokal Pendek

*Fathah* ( \_ َ \_ ) ditulis a, *Kasrah* ( \_ ِ \_ ) ditulis i, dan *Dammah* ( \_ ُ \_ ) ditulis u.

أَحْمَدَ	Ditulis	<i>aḥmada</i>
رَفِيقَ	Ditulis	<i>Rafiqa</i>
صَلَحَ	Ditulis	<i>Ṣaluha</i>

## D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

## E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai الزحيلي	Ditulis	<i>Az-zuḥailj</i>
Fathah + Wawu mati ditulis au طوق	Ditulis	<i>Ṭauq</i>

## F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

روضة الجنة	Ditulis	<i>rauḍah al-Jannah</i>
------------	---------	-------------------------

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

Fathah + Alif ditulis ā فلا	Ditulis	<i>Falā</i>
Kasrah + Ya' mati ditulis ī ميثاق	Ditulis	<i>Mīṣāq</i>
Dammah + Wawu mati ditulis ū أصول	Ditulis	<i>uṣūl</i>

إن	Ditulis	<i>Inna</i>
----	---------	-------------

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء	Ditulis	<i>waṭ'un</i>
-----	---------	---------------

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب	Ditulis	<i>rabâ'ib</i>
-------	---------	----------------

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون	ditulis	<i>ta'khuzûna.</i>
--------	---------	--------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah.</i>
--------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء	ditulis	<i>an-Nisâ'.</i>
--------	---------	------------------

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

## Kata Pengantar



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله اللهم صلِّ و سلم على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Nya atas segala nikmat dan karunia Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliau adalah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini, atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "TELAAH KRITIS TERHADAP SIKAP POLITIK KENEGARAAN M. NATSIR DAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PANCASILA" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A., selaku pembimbing I yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni., M. Ag., M.Hum., selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik, yang tanpa henti memberikan solusi-solusi selama berproses menjadi mahasiswa.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi saya, saya ucapkan terima kasih banyak.
7. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada orang tua tercinta (Bapak Sarojan dan Ibu Romelah), yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta kakek dan nenek saya beserta keluarga besar di Kebumen Jawa Tengah yang selalu mengajarkan arti hidup, sabar serta mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan berkarya.
9. Kepada istri tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan makna dalam setiap langkah hidupku.
10. Warga lingkungan Kos Bapak Yuliantoro, ketua RT dan jajarannya yang mengizinkan tinggal dan bermasyarakat di wilayah Condong Catur, Yogyakarta.
11. Teman-teman yang pernah satu kontrakan Wildan Bakhtiar, Fitrah Wahyudi, M. Jazuli Amrulloh.



12. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak senior dan teman-teman dari IKAPDH yang menempuh pendidikan di Yogyakarta.
13. Untuk sahabat-sahabat komunitas PMH angkatan 2010, Cahyo, Deni, Tafsir, Najib, Hafid, Azmi, Haji, Fathur, Jazuli, Qosim, Agung, Mukti, Rifa'i, Rokhim, Andri, Agil, Azam, Sa'dullah, Shulbi, Chalim, Septi, Chusnul, Khusnul, Dewi, Dina, Faizah, Nurul terimakasih atas persahabatannya selama ini semoga tetap terjalin sampai kapanpun.
14. Untuk teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 80 Kelompok GK-04 Indra, Mahendra, Yusuf, Budi, Hernawan, Eriz, Gusni, Kiki, Nur, Suci, Tati, Terima kasih atas kekompakan dan persaudaraan nya selama ini dalam suasana kekeluargaan di padukuhan Bedug, Girikarto, Panggang, Gunungkidul semoga tetap terjalin persaudaraan sampai kapanpun.
15. Untuk teman-teman di UKM Pramuka, UKM Cepedi, dan IPNU dan IPPNU kota Yogyakarta yang memberikan pelajaran tentang kehidupan dan berorganisasi.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1435 H  
8 Oktober 2014 M

Penyusun,

**Nanang Firmansyah**  
**NIM.10360009**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II :TARIK ULUR PANCASILA DARI MASA KE MASA.....</b>	<b>14</b>
A. ORDE LAMA .....	14
B. ORDE BARU .....	21
C. ERA REFORMASI.....	26

<b>BAB III : BIOGRAFI DAN SIKAP POLITIK .....</b>	<b>32</b>
A. M. Natsir.....	32
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan .....	32
2. Aktifitas Politik dan Organisasi.....	35
3. Pemikiran Dan Sikap Politik .....	39
B. Abdurrahman Wahid .....	49
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan .....	49
2. Aktifitas Politik dan Organisasi.....	54
3. Pemikiran dan Sikap Politik .....	57
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP SIKAP POLITIK M. NATSIR DAN                   ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PANCASILA.....</b>	<b>63</b>
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Politik M. Natsir dan Abdurrahman Wahid .....	63
B. Persamaan Sikap Politik tentang Pancasila Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid .....	68
C. Perbedaan Sikap Politik tentang Pancasila Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid.....	70
D. Implikasi Gagasan Kedua Tokoh Terhadap Perkembangan Politik Islam di Indonesia .....	81
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA CURICULUM VITAE	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah pendirian negara, hampir setiap awal merumuskan berdirinya selalu diawali dengan pencarian kesepakatan antar komunitas yang akan mendukung keberadaan suatu negara. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW meninggalkan sejarah piagam Madinah.<sup>1</sup>

Dalam proses awal pembentukan negara Indonesia, persoalan paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) permasalahan pokok yang dibicarakan adalah persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan tentang masalah-masalah di atas, kecuali dasar filsafat negara, berjalan dengan lancar. Untuk bentuk negara misalnya, hampir seluruh anggota memilih bentuk republik. Tetapi sekali tentang dasar negara disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi sangat hangat.<sup>2</sup>

Ketika terjadi benturan antara Islam dan nasionalisme, masalahnya dapat diatasi lewat perumusan Piagam Jakarta. Dengan kebesaran hati para pemimpin Islam saat itu merelakan dihapusnya “*tujuh kata*”<sup>3</sup> dalam rumusan piagam Jakarta

---

<sup>1</sup> W. Montgomery Watt, *Politik Islam dalam lintasan Sejarah* (Jakarta: P3M, 1998), hlm. 95.

<sup>2</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam : Soekarno vs Natsir* (Jakarta: UI-Pres, 2011), hlm. 31.

<sup>3</sup> Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.



yang mana pada akhirnya melahirkan rumusan Pancasila yang dikenal hingga sekarang sebagai ideologi negara.

Pada masa Orde Lama, persoalan ideologi dan dasar negara dimunculkan dalam sidang-sidang Majelis Konstituante antara tahun 1956-1959. Di dalam perdebatan tersebut muncul ideologi dan dasar negara yang akan menggunakan ideologi Islam, ideologi Pancasila, ataupun ideologi sosial-ekonomi.<sup>4</sup>

Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955<sup>5</sup> diwarnai dengan kejutan dan keprihatinan. Pertama, kegagalan partai-partai Islam meraih suara signifikan. Kedua, menurunnya perolehan suara Golkar. Ketiga, kenaikan perolehan suara PDI P. Keempat, kegagalan PAN, yang dianggap paling reformis, ternyata hanya menduduki urutan kelima. Kekalahan PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun kenyataannya lain.

Ideologi semakin terasa penting ketika tertatih-tatih dalam proses demokratisasi, konflik dan kekerasan yang dapat timbul sewaktu-waktu, pemulihan krisis tak kunjung menemukan titik cerah, sulit merumuskan masa depan, dan setumpuk masalah lainnya.<sup>6</sup> Maka dari itu kemudian wacana ideologi kembali bermunculan kembali.

---

<sup>4</sup> Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 5.

<sup>5</sup> Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Setelah itu Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan.

<sup>6</sup> As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 265.

Dan hingga saat ini pergulatan dalam hal ideologi negara tidak kunjung usai. Maka dari itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Studi Sikap Politik M. Natsir dan Abdurrahman Wahid tentang Pancasila”. Skripsi ini akan lebih memfokuskan kepada kedua tokoh tersebut karena perbedaan dalam memandang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

Cita-cita perjuangan M. Natsir berawal dari memandang ideologi Islam sebagai dasar negara Indonesia. Dan yang lebih menarik hingga akhir hayatnya beliau selalu guguh memperjuangkan ideologi Islam sebagai ideologi negara.

Pada konteks yang lain, pandangan Gus Dur terkait Pancasila ini sangat menginspirasi, karena Gus Dur sebagai guru bangsa dan guru kaum Nahdliyin yang notabene santri. Pandangannya tersebut dapat mendekatkan kaum non-santri yang dari awal menghendaki pancasila dan kaum non-muslim untuk bersama-sama memajukan Indonesia.

Bagi Gus Dur, Pancasila adalah “kesepakatan luhur antara semua golongan yang ada di Indonesia,” dan karenanya setiap warga Indonesia “ terikat ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar, yaitu yang tertuang dalam lima sila, bukan hanya sekedar masing-masing sila. Meskipun begitu, Gus Dur mengakui bahwa seluruh apapun sebuah kesepakatan ia tidak akan berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas.<sup>7</sup>

Paling tidak dalam melihat Pancasila perspektif Gus Dur, perlu didudukkan dalam beberapa hal: *pertama*, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara, berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti oleh

---

<sup>7</sup> Nur Khalik Ridwan, *GUS DUR dan Negara Pancasila* (Yogyakarta: CV. Tiga Bintang Jogjakarta, 2010), hlm. 31.

undang-undang dan produk-produk hukum yang lain. *Kedua*, sebagai falsafah dan ideologi bangsa, harus jelas dikatakan “adanya tumpang tindih antara Pancasila dengan sebagian sisi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Gus Dur berargumentasi: satu sisi, agama-agama yang ada dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur universal, sehingga sulit dibatasi hanya dalam konteks keindonesiaan, dan sisi lain, Pancasila adalah keindonesiaan itu sendiri.<sup>8</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Dari pemaparan latar belakang kedua tokoh di atas yakni M. Natsir dan Abdurrahman Wahid fokus analisis skripsi ini adalah perbedaan pandangan dalam masalah Pancasila sebagai ideologi Negara. Mengenai hal ini skripsi membatasi kajian terhadap kedua tokoh tersebut, M. Natsir yang hidup pada masa Orde Lama yang mana terdapat perbedaan pendapat dengan Soekarno sedangkan Abdurrahman Wahid pada masa Orde Baru dan setelah reformasi.

Terkait dengan latar belakang di atas, ada dua pokok permasalahan yang akan dikaji:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sikap politik M. Natsir dan Abdurrahman Wahid mengenai Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia ?
2. Dimana letak persamaan dan perbedaan sikap politik M. Natsir dan Abdurrahman Wahid terkait ideologi Negara Indonesia ?

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan objek kajian dan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang latar belakang sikap politik M. Natsir dan Abdurrahman Wahid mengenai Pancasila.
2. Menganalisis perbedaan pandangan antara M. Natsir dan Abdurrahman Wahid dalam memandang Pancasila.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah khazanah pemikiran, terutama dalam ideologi negara.
2. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pemikiran kedua tokoh tersebut dalam mengkaji Pancasila.
3. Sebagai referensi riset lanjutan bagi para akademi/peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh ini kajian tentang Pancasila telah banyak. Namun pengkajian yang memkomparasikan tokoh antara M. Natsir dan Abdurrahman Wahid mengenai Pancasila belum ada, walaupun ada itu dibahas hanya satu tokoh saja. Misalnya, M. Natsir, dalam karyanya *Capita Selecta*. Buku ini hampir menerangkan secara utuh perjalanan dan perjuangan M. Natsir dalam memperjuangkan ideologi Islam, sebagai nilai dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam buku ini juga membahas masa sulit M. Natsir dari tekanan rezim yang berkuasa pada saat itu.



Ahmad Suhelmi, M.A. dalam bukunya yang berjudul *Polemik Negara Islam Soekarno vs M. Natsir*.<sup>9</sup> Buku ini menjelaskan peran Islam dalam upaya memperlihatkan jati diri dengan memposisikan Islam sebagai dasar negara dalam pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menerangkan respon M. Natsir terhadap tulisan-tulisan Soekarno yang dianggap terlalu mendiskriminasi Islam.

Dalam buku karya Nur Khalik Ridwan yang berjudul *GUS DUR dan Negara Pancasila*<sup>10</sup> berhasil membaca dan memetakan gagasan Pancasila ala Gus Dur. Di sana Nur Khalik Ridwan dengan begitu lihai mengolah data menjadikan buku ini begitu sistematis. Buku ini selain mengupas pandangan Gus Dur tentang Pancasila dan pentingnya negara Pancasila bagi bangsa Indonesia, juga merupakan karya otoritatif yang mengupas prisma pemikiran Gus Dur tentang ideologi bangsa.

Dan skripsi yang ditulis oleh Samin dengan judul *Polemik Agama dan Negara (Studi Komparatif Soekarno vs M. Natsir tentang ideologi Negara)*.<sup>11</sup> Pada hal ini dikaji lebih dalam karena ideologi Negara yang sekarang dipakai yaitu Pancasila dianggap belum mencukupi memenuhi dasar hukum untuk masyarakat Indonesia. Dan Natsir benar-benar tidak sepatutnya jika agama dipisahkan dari Negara dan juga Pancasila sebagai ideologi Negara.

Dan juga dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Anfasul Marom yang berjudul *Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia : Studi Pemikiran M.*

---

<sup>9</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam : Soekarno vs Natsir*, Jakarta: UI-Pres, 2011.

<sup>10</sup> Nur Khalik Ridwan, *GUS DUR dan Negara Pancasila*, Yogyakarta: CV. Tiga Bintang Jogjakarta, 2010.

<sup>11</sup> Samin, *Studi Komparatif Soekarno vs M. Natsir tentang ideologi Negara*, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN, 2008).

Natsir Dan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam Dan Negara.<sup>12</sup> Ahmad Anfasul Marom mencoba membaca pemikiran kedua tokoh tersebut dalam memandang relasi Islam dan Negara dengan menggunakan pendekatan Ushul Fikih yang mana menyinggung kaitannya dengan ideologi negara akan tetapi cakupannya masih secara umum.

Kemudian untuk mendapat uraian historis mengenai perkembangan politik yang menandai respon umat Islam terhadap Pancasila, dengan melihat bagaimana sejarah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan bagaimana bentuk respon umat Islam terhadap Pancasila berikut alasan-alasan yang mendasarinya baik secara individu maupun kelompok, dapat dilihat dalam bukunya Faisal Ismail yang berjudul *Ideologi Hegemoni dan otoritas agama, wacana ketegangan kreatif Islam dan Pancasila*.<sup>13</sup>

Pemikiran Munawir Sjadzali mengenai negara agama atau negara teokrasi, sebuah negara akan dikatakan negara agama atau teokarasi, apabila terdapat unsur-unsur tertentu, maka negara tersebut dapat dikatakan negara agama, atau negara teokrasi. Pancasila sebagai ideologi negara menurut Munawir dikarenakan negara Indonesia tidak terdapat dari unsur negara agama atau negara teokarasi. Pancasila sebagai ideologi negara menurut Munawir merupakan untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara umum, baik itu dari aspek politik

---

<sup>12</sup> Ahmad Anfasul Marom, *Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia : Studi Pemikiran M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam Dan Negara*, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN, 2004).

<sup>13</sup> Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Krestif Islam dan Pancasila*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 67.

maupun sosialekonomi. Ini termuat dalam skripsi Dedy Faisal yang berjudul Islam dan Negara (Negara Pancasila Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali).

Dari pembahasan buku dan karya tulis di atas maka dalam penulisan penelitian ini diharapkan akan didapatkan data-data yang valid dan dapat digunakan dalam pembahasan permasalahan yang dikaji.

### **E. Kerangka Teoretik**

Lebih lanjut, penelitian ini dikategorikan dalam perspektif *Fiqh as-Siyasah* atau Siyasah as-Syar'iyah. Menurut Abdul Wahab Khallaf definisi Siyasah as-Syar'iyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.<sup>14</sup> Dengan demikian siapapun yang ingin membangun pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada *Maslahah al-Mursalah* (kepentingan umum).<sup>15</sup>

Pada mulanya politik menjadi tulang punggung sejarah. Oleh karena itu buku-buku teks sejarah yang berisi tentang kejadian-kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani), dan interaksi antar

---

<sup>14</sup> F. Aminuddin Aziz, "Kuliah Fiqh Siyasah (Politik Islam)," <http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>, akses 12 Mei 2014.

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.116.

kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan. Dominasi politik dalam penulisan sejarah menjadi kewajaran untuk waktu yang lama.<sup>16</sup>

Masykuri Abdillah dalam tulisannya membagi karakteristik pemikiran politik Islam kontemporer ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, adalah kelompok konservatif. Ciri yang menonjol dari kelompok ini adalah adanya aksioma ideologis yang dibangun berdasarkan ajaran-ajaran Islam bahwa Islam berisi syari'at yang sempurna, lengkap, komprehensif dan berlaku universal untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan waktu. Asumsi ini membawa aplikasi pada keharusan untuk menerima superioritas Islam sebagai satu-satunya ideologi untuk mengkonstruksi sistem politik, pemerintahan atau negara. Caranya adalah dengan menghidupkan kembali praktik dan pemikiran politik zaman Nabi, Khulafur Rasyidin dan kekhalifahan Islam setelahnya. Nama-nama Sayyid Qutb, Rasyid Ridla, dan Abu Al-A'la Al-Maududi masuk dalam kelompok ini.<sup>17</sup>

*Kedua*, adalah kelompok modernis. Kelompok ini berpendirian bahwa syari'at mengatur masalah keduniaan dan kemasyarakatan (termasuk juga pemerintahan dan Negara) hanya dalam tataran nilai dan prinsip-prinsip umumnya saja, adapun secara teknis biasa mengadopsi sistem lain, yang dalam ini adalah sistem barat yang telah terbukti manfaat dan keunggulannya. Dengan keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang selaras dengan modernitas, kelompok ini juga menyerukan dua hal sekaligus, yakni pentingnya melakukan ijtihad terus menerus dan perlunya menguji kembali validitas teori dan praktik politik zaman

---

<sup>16</sup> Kuntowijoyo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 174.

<sup>17</sup> Masykuri Abdillah, *Gagasan dan tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*, (Jakarta: Tashwirul Afkar, 2000), hlm. 103.

Nabi dan kekhalfahan dengan tetap mengambil secara substansinya yang dianggap relevan dengan tuntutan dan semangat dunia modern. Diantara tokoh-tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Muhammad Husain Haikal dan Muhammad As'ad.<sup>18</sup>

*Ketiga*, adalah kelompok sekuler. Syari'at Islam, dalam pandangan kelompok ini dianggap hanya berurusan dengan persoalan individual yang mencakup aturan-aturan soal hubungan manusia dengan Tuhan semata. Seluruh persoalan keduniaan (termasuk Negara) adalah bersifat temporal dan profan dimana manusia dengan segala kemampuan yang dimilikinya memiliki hak penuh untuk menentukan dan mengaturnya tanpa harus ada justifikasi dan keterikatan dengan doktrin-doktrin keagamaan. Tokoh utama dari kelompok ini tentu saja adalah 'Ali 'Abd ar-Raziq.<sup>19</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data menjelaskan dan menyimpulkan pembahasan dalam bahasan ini, penyusun menempuh beberapa metode, metode tersebut diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



### A. Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern. Literatur Arab, Inggris, Indonesia dan sebagainya yang ada kaitannya dengan persoalan ini.

### B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, komparatif dan analisis. Yang dimaksud dengan *deskriptif* adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam masyarakat atau literatur. Dengan kata lain yang dikaji dalam penelitian ini ialah karakter dari kedua tokoh tersebut dan beberapa hal yang mempengaruhi pemikiran mereka. Adapun *analisis* adalah *analisis* dalam pengertian historis, yakni meneliti akar sejarah yang melatarbelakangi gagasan mereka.

Sedangkan *komparatif* adalah membandingkan sikap politik kedua tokoh tersebut dalam proses penelitiannya, supaya mendapatkan letak persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah mengumpulkan bahan-bahan atau tulisan-tulisan kedua tokoh yang sedang diteliti, sedangkan data sekunder adalah

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek pembahasan yang diteliti.

#### D. Analisis Data

Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif-komparatif. Teknik dalam menganalisa secara deduktif, yaitu pola kajian yang dibahas dan dikaji berawal dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus.

Sementara *komparatif* dimaksudkan untuk membandingkan sikap politik kedua tokoh tersebut apakah terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan di antara keduanya.

#### E. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis-historis. Maksud dari pendekatan normatif-historis yaitu suatu pendekatan untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku sebagai upaya penegasan yang juga merupakan pengaruh dari hasil interaksi dengan lingkungan dan akar sejarah yang berkembang.

#### G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dibaca dengan mudah maka penelitiannya perlu secara sistematis. Penelitian ini disusun dalam lima bab secara kronologis saling berkaitan dan utuh. Bab *Pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, peneliti akan memaparkan secara umum terkait dengan ideologi negara. Yang mana akan dijelaskan lagi dalam beberapa kategori terjadinya pertarungan tarik ulur Pancasila dalam tiga masa yaitu : Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Sehingga, dapat diketahui perkembangan Pancasila dari masa kemasa.

Bab *Ketiga*, menjelaskan biografi M. Natsir dan Abdurrahman Wahid, dalam bab ini peneliti mencoba menjelaskan secara umum yaitu biografi sikap politik dan intelektual M. Natsir dan Abdurrahman Wahid yang masing-masing akan dikembangkan lagi menjadi beberapa kategori yaitu, pendidikan, pengaruh sosio-organisasi, organisasi kemasyarakatan, dan iklim politik pada masanya masing-masing. Maka dari itu akan lebih mudah meneliti kedua tokoh tersebut.

Bab *Keempat*, pada bab ini penulis mencoba menggali faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik kedua tokoh tersebut dan mengkomparasikannya sehingga dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini memuat jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat, baik dari sudut pandang tentang pemikiran ideologi negara maupun dampak dari gagasan kedua tokoh tersebut hingga saat ini. Sedangkan saran, sebagai wujud sumbangsih penulis terhadap tanggungjawab keilmuan dan ditujukan bagi para penyusun atau peneliti yang akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, secara historis bisa dipahami bahwa kedua tokoh ini hidup pada zaman yang berbeda. Akan tetapi menghadapi situasi politik yang bisa dikatakan hampir sama. Dan juga cita-cita mereka masih terasa hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari implikasi sikap kedua tokoh terhadap perkembangan politik saat ini. Untuk lebih jelasnya, disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut sangat jelas. M. Natsir yang cenderung konservatif. Kecenderungan ini jelas dipengaruhi oleh latar belakang pergaulan dan pendidikan yang diperolehnya. Sejak kecil, M. Natsir telah cukup intens bergaul dan hidup di tengah-tengah orang yang diidentifikasi sebagai reformis, modernis, bahkan fundamentalis muslim, meskipun ia juga memperoleh pendidikan Barat. Ia pun digolongkan ke dalam kelompok modernis muslim Indonesia. Sedangkan Gus Dur, dilatarbelakangi keluarga tradisional serta pertemuannya dengan pemikiran-pemikiran Barat sekuler menjadikannya liberal dalam berfikir. Meskipun ia memiliki komitmen yang tidak kalah kuat dengan tokoh muslim yang lain, Gus Dur tidak menghendaki formalisme agama atau hukum Islam dalam pemerintahan kenegaraan.

Mengenai keterlibatan M. Natsir dalam perpolitikan dan organisasi. M. Natsir sangat berkaitan dengan tokoh radikal Ahmad Hasan yang tidak lain

merupakan pendiri Persatuan Islam (Persis). M. Natsir memulai dengan menyumbangkan pemikirannya lewat majalah yang di publikasikan dalam Pembela Islam. Pemikiran M. Natsir juga dipengaruhi oleh pemikir intelektual Islam al-Maududi. Dalam meniti karier politiknya, M. Natsir juga bergabung dengan Masyumi yang merupakan organisasi keagamaan dan politik yang mempengaruhi arah pemikiran dan sikap atau perilaku politik M. Natsir dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan politiknya. Selanjutnya Gus Dur, yang merupakan cucu dan anak dari tokoh besar Organisasi Islam yaitu NU, yang kemudian menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz PBNU dan pada akhirnya Gus Dur yang merupakan salah satu pendiri partai politik yakni PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang berasaskan Islam dan Pancasila.

### **Faktor faktor yang mempengaruhi sikap politik**

#### **M. Natsir dan Abdurrahman Wahid**

<b>Faktor tentang</b>	<b>M. Natsir</b>	<b>Gus Dur</b>
Sosial	Lingkungan modern	Lingkungan tradisional
Pendidikan	Pendidikan modern	Pendidikan tradisional
Organisasi	Persis yang bersifat radikal	NU
Karier politik	Masyumi	PKB
Jabatan Kenegaraan	Perdana Menteri	Presiden

2. M. Natsir dan Gus Dur sama-sama menerima bahwa dalam Islam tidak mengatur sebuah negara. Dan keduanya sepakat bahwa tumpuk kekuasaan



berada di tangan rakyat, maka dari itu mereka menerima demokrasi dengan kedaulatan rakyat.

Secara normatif yang membedakan sikap M. Natsir dan Gus Dur dalam menyikapi Pancasila sebagai ideologi negara, itu dapat disimpulkan dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون (الذاريات)

M. Natsir berpendapat bahwa manusia adalah sepenuhnya milik Allah, jadi sebagai hamba harus selalu taat kepada-Nya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mana sebagai seorang muslim keduanya tidak dapat dipisahkan dari ideologi.

Sedangkan Gus Dur didasarkan pada salah satu kaidah ushul fikih yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Gus Dur mengaplikasikan ini dalam sikap kenegaraannya, karena setiap tindakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia, baik menerima kebaikan maupun menolak kemadaratan. Kemaslahatan yang ditempuh pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih universal mencakup totalitas masyarakat, tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau individu.

## **B. Saran-Saran**

1. Umat Islam di Indonesia yang merupakan kelompok mayoritas haruslah bisa memposisikan diri sebagai kelompok pemersatu bangsa agar tidak terjadi pecah belah. Oleh karenanya, dalam pembahasan Pancasila haruslah dilihat dari sisi historisnya, apalagi pada konteks kekinian (postmodernisme).
2. Skripsi ini hanyalah salah satu cara bagaimana menyikapi pada perbedaan cita-cita ideologi negara yaitu Pancasila yang kemudian penyusun hadapkan pada dua tokoh, M. Natsir dan Gus Dur. Untuk itu masih banyak aspek lain yang bisa diteliti oleh penyusun selanjutnya mengingat baru sebagian masalah yang saat ini penyusun kaji dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Di antaranya mengenai demokrasi, sistem tata negara Islam, dan eksistensi partai Islam di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

### B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

### C. Kelompok Buku

Abdillah, Masykuri, *Gagasan dan tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*, Jakarta: Tashwirul Afkar, 2000.

Al-Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, cet. V, Jakarta: Darul Falah, 1998.

Ali, As'ad Said, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi*, Jakarta: LP3ES, 2012.

-----, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES, 2009.

Amin, M. Mansyur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin, 1996.

Anshari, Endang Saifuddin, *PIAGAM JAKARTA 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Firdaus A. N., *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang di Era Reformasi*, Jakarta: Al-Kautsar, 1999.

Harjono, Anwar, dkk, *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Haris, Syamsuddin, *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1994.

- Hasan, M. Nur, *Ijtihad Politik NU*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Manhaj, 2010.
- Iqbal, Muhammad, D. Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Krestif Islam dan Pancasila*, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kasemin, Kasiyanto, *Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan TAP MPRS/XXV/1966*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Konstituante RI, *Tentang Dasar Negara RI dalam Konstituante*, cet. Ke-1, Bandung: tp, 1958.
- Kuntowijoyo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Latif, Yudi, *Inelegensia Muslim dan Kuasa*, Bandung: Mizan, 2005.
- Luth , Thohir, *M. Natsir dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- M. Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Capita Selecta II*, Jakarta: Pustaka Pendis, 1957.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- , *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- , *Islam dan Teori Politik Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- , *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1993.
- Mahfud MD, *GUS DUR Islam, Politik, dan Kebangsaan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Masdar, Umarudin, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais, Tentang Demokrasi*, Cet ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Musa, Ali Masykur, *Pemikiran dan Sikap Politik GUS DUR*, Jakarta: Erlangga, 2010.

- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- , *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan, 2000.
- Novianto, Kholid, Al Chaidar, *Era Baru Indonesia : Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Djilil, Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1992.
- , *Demi Kepentingan Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- , *Moralitas Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Dinamika, 1995.
- Ridwan, Nur Khalik, *GUS DUR dan Negara Pancasila*, Yogyakarta: CV. Tiga Bintang Jogjakarta, 2010.
- Rifa'I, Muhammad, *GUS DUR, Biografi Singkat 1940-2009* cet. Ke-III, Yogyakarta: Garasi, 2012.
- Said, Muhammad, *Peranan Islam Dalam Penghayatan, Pengamalan dan Pengamanan Pancasila*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Sitompul, Agussalim, *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Misaka Galiza, 2008.
- Sitompul, Einar, *NU dan Pancasila*, Jakarta: sinar Harapan, 1989.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam : Soekarno vs Natsir*, Jakarta: UI-Pres, 2011.
- Sumarno , Kohar Hari, *Manusia Indonesia, Manusia Pancasila*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Valina Singka Subekti dkk, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1997.
- Waluyo, *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Watt, W. Montgomery, *Politik Islam dalam lintasan Sejarah*, Jakarta: P3M, 1998.

#### **D. Kelompok Lain**

- Aziz, F. Aminuddin, “ Kuliah Fiqh Siyasah (Politik Islam),” <http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>, akses 12 Mei 2014.



## CURICULUM VITAE

Nama : Nanang Firmansyah  
Tempat Lahir : Kampar, Riau  
Tanggal Lahir : 13 Desember 1991  
Agama : Islam  
Alamat di Yogyakarta: Condong Catur, Yogyakarta  
Alamat Asal : Desa. Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan  
Prov. Riau  
Email : nanang\_f91@ymail.com  
No. Telp. / HP : 081804303061

### 1. Pendidikan Formal.

- a. TK Pertiwi Kerumutan lulus tahun 1998.
- b. SD N 011 Kerumutan lulus tahun 2004.
- c. MTs Darul Hikmah Pekanbaru lulus tahun 2007.
- d. MA Darul Hikmah Pekanbaru lulus tahun 2010.
- e. Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010-2014.

### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyyah Awwaliyah Kerumutan lulus tahun 2004.
- b. Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru 2004-2010.

### 3. Pengalaman Organisasi

NO	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Koordinator Pramuka MA Dar El Hikmah Pekanbaru	Wakil Ketua	2007-2008
2	IPM (Ikatan Pengurus Muhadhoroh) MA Dar El Hikmah Pekanbaru	Anggota Bagian Pengajaran	2007-2008

3	OSDH (Organisasi Santri Dar El Hikmah) Pekanbaru	Keamanan	2008-2009
4	Remaja Masjid Pon-Pes Dar El Hikmah Pekanbaru	Bidang Ibadah	2009-2010
5	UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga	Sekretaris	2012-2013
6	UKM Pencak Silat Cepedi UIN Sunan Kalijaga	Wakil Ketua	2012-2013